



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE
JALAN BLANGKEJEREN KM. 3,5 KUTACANE 24652
TELEPON (0629) 21217 21840 FAKSIMILI (0629) 21222

Nomor : S-281/WPB.01/KP.105/2018
Sifat : Segera
Hal : Persetujuan Dispensasi Pengajuan Data Kontrak

09 Maret 2018

Yth. KPA Polres Gayo Lues
di Blangkejeren

1. Dasar :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Surat Menteri Keuangan No. S-67/MK.05/2018 tanggal 02 Februari 2018 hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2018;
 - c. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-1717/PB/2018 tanggal 15 Februari 2018 hal Petunjuk Teknis Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2018 pada Kanwil DJPb dan KPPN;
 - d. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Polres Gayo Lues nomor SD/02/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 Perihal Permohonan Dispensasi Pengajuan Kontrak yang kami terima tanggal 09 Maret 2018.
2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, dengan ini diberikan persetujuan dispensasi pengajuan data kontrak atas Kontrak Nomor SPK/02/II/2018 tanggal 01 Januari 2018 dengan nilai kontrak Rp550.000.000 ;
3. Dapat kami sampaikan kembali bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penyampaian data kontrak ke KPPN paling lambat adalah 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani;
4. Tata Cara Pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi dana APBN agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Kepala Kantor,

Andi Permadi

NIP 19711227 199301 1 001

Tembusan:

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh